**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 04 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PROYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, perlu dilakukan intensifikasi dalam mencari dan menggali sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pedapatan daerah melalui pemungutan retribusi ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Penghitungan APBD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Interaksi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI ATAS DOKUMENTASI LELANG PROYEK.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Dinas Pendapat Daerah adalah Kepala Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Tanggamus;
6. Retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada setiap peserta lelang sebagai imbalan jasa atas dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
7. Peserta lelang adalah setiap rekanan yang diundang untuk mengikuti pelelangan;
8. Rekanan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah lulus prakualifikasi untuk melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya;
9. Panitia lelang adalah pemilik pelelangan/pengadaan jasa yang dibentuk oleh Dinas Instansi yang mengelola proyek barang dan jasa tersebut;
10. Pelelangan adalah suatu bagian kegiatan atas pekerjaan proyek yang dilaksanakan melalui prosedur dan proses penawaran dari peserta lelang;
11. Proyek adalah suatu kegiatan pembangunan baru dan atau perbaikan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat investasi;
12. Dokumen lelang adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Dearah kepada rekanan yang diundang, berisi informasi, syarat, diperhitungkan dan dipatuhi penawarannya untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dilelang;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.

B A B II OBJEK DAN SUBYEK DOKUMEN LELANG PROYEK

Pasal 2

- (1) Objek Dokumen Lelang adalah setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Subjek Dokumen Lelang adalah setiap rekanan yang diundang untuk mengikuti pelelangan atau penawaran proyek.

Pasal 3

- (1) Untuk setiap proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dokumennya disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap rekanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diharuskan menggunakan dokumen yang disediakan atau dibuat oleh Pemerintah Daerah;

B A B III TATA CARA MENDAPAT DOKUMEN LELANG PROYEK

Pasal 4

Untuk mendapatkan dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, peserta lelang harus dapat menunjukkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Isian perhitungan sisa kemampuan nyata (SKN);
- b. Surat undangan pelelangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau petugas yang ditunjuk melakukan penelitian atas kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut diatas;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, kepada peserta lelang diwajibkan membayar retribusi atas dokumen lelang yang telah ditetapkan sekaligus dimuka;
- (3) Kepada peserta lelang yang telah melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus ditujukan kepada Panitia Pelelangan pada waktu pengembalian dokumen lelang proyek;
- (5) Banyaknya dokumen lelang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap proyek disesuaikan dengan jumlah peserta lelang.

Pasal 6

Tanda bukti pembayaran retribusi atas dokumen lelang proyek merupakan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran oleh peserta lelang.

Pasal 7

Ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, berlaku juga untuk proyek-proyek yang dilaksanakan dengan tujuan langsung.